



Bongkasa Pertiwi

Tagih Janji Pemkab

Kami akan terus berupaya membantu. Seperti halnya dalam promosi. Tapi masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab seutuhnya kepada pemerintah."

Cok Raka Darmawan
Kadis Pariwisata Badung

Lima Tahun Desa Wisata, Belum Ada Progress

MANGUPURA - Program pengembangan desa wisata di Badung masih jalan di tempat. Misalnya saja Desa Wisata Bongkasa Pertiwi. Sejak ditetapkan dengan SK Bupati tahun 2010 lalu, desa wisata yang terletak di Kecamatan Abiansemal, ini belum juga berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian warga setempat. Salah satu tokoh warga Desa Bongkasa Pertiwi, I Made Suarjana mengatakan,

potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Mengingat desa tersebut sudah memiliki sejumlah atraksi pariwisata. "Saya berharap wujud nyata tidak hanya diberikan label desa wisata saja. Sebab, kalau desa wisata berkembang masyarakatnya akan bisa menikmati pariwisata," harapnya. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Cok Raka Darmawan mengatakan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyerahkan pengembangan desa wisata di wilayahnya kepada pemerintah. "Kami akan terus berupaya membantu, seperti halnya

belum ada gebrakan yang signifikan dari pemerintah untuk mengembangkan desa wisata. Menurutnya, sejak ditetapkan sebagai desa wisata, baru tahun ini Pemkab Badung mengucurkan bantuan dengan membangun WC umum untuk memenuhi persyaratan sebagai desa wisata. "Kami harapkan desa wisata ini menjadikan rumah penduduk sebagai penginapan, sehingga masyarakat bisa menikmati pariwisata," ujarnya belum lama ini. Sejak dulu, Desa Bongkasa Pertiwi diakui Suarjana telah mengembangkan pariwisata. Hanya saja, pariwisata yang berkembang di kawasan tersebut adalah atraksi wisata, seperti rafting dan pinball. Padahal, desanya memiliki

dalam promosi, tapi masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab seutuhnya kepada pemerintah," tegasnya. Dia berharap, masyarakat kreatif mengembangkan desa wisata yang ada di wilayahnya demi kemajuan bersama, harus ada kreativitas. Pejabat berkumis ini berpendapat, memajukan desa wisata harus dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan wisatawan yang datang berwisata ke Desa Bongkasa Pertiwi. Apalagi desa ini sudah memiliki potensi yang sangat layak untuk dipromosikan dan telah memenuhi kriteria menjadi Desa Wisata. (san/han)



MUSRENBANGNAS

Buleleng Ngotot Ajukan Shortcut

SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng akan kembali mengajukan rancangan pembangunan *shortcut* alias jalan pintas Bedugul-Singaraja, untuk memperpendek jarak tempuh Denpasar-Singaraja. Kali ini Pemkab Buleleng kembali menggebu-gebu merancang shortcut, dan akan mengusulkannya kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Sebetulnya, pembangunan *shortcut* itu telah direncanakan Pemkab Buleleng pada tahun 2013 lalu. Ketika itu, dalam *grand design* yang disusun pemerintah, diperkirakan pembuatan *shortcut* Bedugul-Singaraja akan menelan dana Rp 1,4 triliun. Namun seiring dengan terjadinya sejumlah agenda politik, rencana itu tenggelam. Kepala Bappeda Buleleng Gede Dharmaja mengatakan, Pemkab Buleleng sudah merancang 17 usulan program yang diusulkan dalam Musrenbangnas. Dari belasan program itu, salah satunya adalah pembuatan shortcut Bedugul-Singaraja.

Dalam rancangan awal, *shortcut* akan dibangun mulai dari Desa Wanagiri di Kecamatan Sukasada, dan terus membentang hingga Desa Padangbulia, yang juga masih di wilayah Kecamatan Sukasada. Pembuatan *shortcut* itu diprediksi bisa memperpendek waktu tempuh hingga separonya.

"Pertimbangan kami bukan hanya jarak dan waktu. Tapi di jalur Singaraja-Bedugul itu perumahan masih jarang. Mayoritas masih perkebunan. Jadi kami anggap di sana yang paling feasible," imbuhnya.

Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pembuatan *shortcut* Bedugul-Singaraja sangat masuk akal dilakukan. Mengingat tiga buah *shortcut* juga telah dibangun di Kabupaten Tabanan. "Dengan pembangunan *shortcut* itu, saya yakin akan terjadi keseimbangan pembangunan Bali Utara-Bali Selatan," kata Agus. (eps/yor)

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 25



Pemkab Buleleng Pengeng

Sekdes Jadi Perangkat Desa, Yang PNS Ditarik Lagi

SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng benar-benar dibuat pengeng dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah aturan sebelumnya mengamanatkan bahwa sekretaris desa harus dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini jabatan sekdes kembali menjadi perangkat desa yang bukan PNS lagi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, kini tengah melakukan proses telaah, di samping



EKA PRASETYA/RADAR BALI

Gede Sandhiyasa

mempersiapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Kepala BPMPD Buleleng, Gede Sandhiyasa mengatakan, pemerintah kini tengah mengkaji PP 43/2015. Menurut Sandhiyasa, ada banyak perubahan dalam PP tersebut, sehingga mewajibkan pemerintah kabu-

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 25



Radar Bali

Sambungan

Jadi, sekdes-sekdes yang sudah berstatus PNS, terpaksa ditarik lagi ke sekretariat daerah atau ke BKD. Mereka tidak boleh lagi bertugas di desa, karena di desa itu tidak ada lagi PNS. Semuanya masuk status perangkat desa, termasuk Kaur dan kelian banjar dinas."

Gede Sandhiyasa

Kepala BPMPD Buleleng

paten melakukan perubahan dalam perda.

Salah satu hal yang krusial, adalah kembalinya jabatan sekdes menjadi perangkat desa. Padahal pada tahun 2014 lalu, setidaknya ada 15 desa yang jabatan sekdesnya masih kosong, karena tak mendapatkan PNS yang bersedia sebagai sekdes. Kini dengan terbitnya PP yang baru, sekdes menjadi perangkat desa dengan persyaratan-persyaratan khusus.

Salah satunya harus mengantongi ijazah SMA atau sederajat, serta berusia minimal 20 tahun, atau maksimal 42 tahun. Mau tak mau, pemerintah harus segera melakukan peralihan posisi PNS yang menjabat sebagai sekdes.

"Jadi sekdes-sekdes yang sudah berstatus PNS, terpaksa ditarik lagi ke sekretariat daerah atau ke BKD. Mereka tidak boleh lagi bertugas di desa, karena di desa itu tidak ada

lagi PNS. Semuanya masuk status perangkat desa, termasuk kaur dan kelian banjar dinas," kata Sandhiyasa yang ditemui disela-sela Tawur Kesanga Balik Sumpah, di Catus Pata Buleleng, Jumat (20/3).

Sandhiyasa menambahkan, dari hasil koordinasi dengan BKD, rencananya sekdes-sekdes yang menjadi PNS, akan ditarik kembali statusnya ke BKD Buleleng. Sebelum ditempatkan pada posisi yang sesuai. Tak menutup kemungkinan sekdes-sekdes yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten, akan ditempatkan di kantor camat.

"Semuanya masih dalam kajian. Nanti mereka ditarik, bersamaan dengan rekrutmen sekdes, setelah revisi Perda selesai. Nanti BKD yang akan melakukan telaah dari sisi kepegawaian," tandasnya. (eps/yor)

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 25



Radar Bali

Reaksi CV. Wulandari, Pemenang Tender Bibit Tanaman di Dishutkanlut Jembrana Membantah Tak Penuhi Syarat, Tuding Pelapor Tak Puas karena Kalah



M.BASIR/BALI EXPRESS

BARANG BUKTI: Bibit tanaman yang diduga bermasalah dalam proses tendernya karena memenangkan perusahaan yang tak memenuhi syarat.

Proyek pengadaan bibit tanaman kayu dan buah yang diduga bermasalah. Selain dilaporkan ke inspektorat kabupaten Jembrana, juga dilaporkan ke kepolisian karena ada dugaan pemenang tender tidak memenuhi syarat. Apa reaksi dari perusahaan pemenang tender ini?

PEMILIK usaha pemenang tender CV. Wulandari, Arman berang ketika perusahaannya dituding tidak memenuhi syarat dalam tender proyek

pengadaan bibit tanaman kayu dan buah di Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana. Katanya, tudingan CV. Floradewata yang kalah tender pengadaan tender disebut mengada-ada. Bahkan tudingan bibit dari CV.Wulandari yang disebut tidak memenuhi spesifikasi dibantah.

"Semua sudah sesuai dengan spesifikasinya, kalau tidak sesuai tidak mungkin dinilai memenuhi syarat oleh panitia pengadaan dan tidak menang lelang," ungkapnya Jumat (20/3) lalu.

Tudingan lain CV. Floradewata, menurut Arman adalah pemalsuan tanda tangan UD. Flora Bali. Menurut Arman, dirinya tidak memalsukan

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 25



Radar Bali

Sambungan.

tanda tangan perusahaan Flora Bali yang pernah menjadi rekan kerjanya. Sebanyak 12 ribu batang kayu keji mas

yang pernah diperiksa tim dibeli dari seorang warga bernama Wayan Sandi.
"Di mana pemalsuannya, saya

beli di perorangan," ungkapnya. Namun demikian, Arman mengaku tidak ingin terlibat lebih jauh dalam polemik yang dilaporkan ke Inspektorat tersebut. Bahkan menurut Arman, pengaduan juga disebutkan telah dilayangkan ke Polres Jembrana. Dia menduga laporan itu dibuat karena sanggahan pertama dari pihak perusahaan yang kalah tidak puas dengan jawaban panitia.

"Mungkin karena tidak puas karena kalah tender," ujar dia. Menurut Arman, seharusnya jika tidak puas dengan sanggahan pertama harus melakukan sanggahan kedua. Bahkan dirinya sudah membuat surat permintaan pemeriksaan kepada panitia

lelang agar perusahaannya diperiksa lagi. Namun kenyataannya pihak UD Flora Dewata bersurat ke inspektorat dan polres Jembrana.

"Seharusnya melakukan sanggahan kedua dan surat permintaan pemeriksaan ditanggapi dulu," terangnya.

Menurut Arman, sebenarnya dugaan masalah pengadaan bibit yang dia menangkan dengan nilai tawar Rp 1,1 miliar lebih dari harga pagu Rp 1,22 miliar, tidak secara langsung yang dipermasalahkan adalah CV-nya. Melainkan ULP dan panitia pengadaan di Dishut-kanlut Jembrana.

"Saya hanya kena efeknya dengan masalah ini, karena prosedur sudah saya ikuti dan persyaratan sudah lengkap," tegasnya.

Arman menjelaskan pengadaan bibit tanaman jenis buah buahan dan tanaman seperti mahoni, jati dan mangrove itu, total yang dia menangkan dari tawaran Rp 1 miliar lebih itu sebanyak total 90 ribu bibit tanaman. Bibit tanaman itu untuk delapan subak abian se-Kabupaten Jembrana.

Sementara Kastreskrim Polres Jembrana AKP I Gusti Made Sudarma Putra, saat dikonfirmasi terkait informasi adanya laporan, mengaku belum menerima. "Saya belum terima pengaduan atau laporannya," ungkapnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Jembrana Wayan Kori-ani, saat dikonfirmasi gagal. Dihubungi melalui telepon genggamnya tidak ada jawaban. (m. basir/yor)

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 25



Radar Bali

Tim Sembilan Segera Disidang

Terkait Kasus Lahan Dermaga Gunaksa

SEMARAPURA - Tak lama lagi, Tim Sembilan tersangka pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung, yakni, Janapria Cs bakal menjadi pesakitan. Rencana sidang ini menyusul mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra yang menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar, dalam kasus serupa.

Kasi Intel Kejari Klungkung, Suhadi, kepada koran ini mengatakan, berkas perkara tersangka Tim Sembilan, sudah dilimpahkan, dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurutnya, pelimpahan itu sudah dilakukan Senin (16/3) lalu. "Tinggal selangkah lagi, mereka bisa disidangkan," jelas Suhadi, dihubungi *Jawa Pos Radar Bali*, Jumat (20/3).

Saat ini, JPU masih berkitit menyusun dakwaan. Jumlah JPU yang bakal mengawal kasus itu, dipersidangkan berjumlah 12 orang. Dia pun memperkirakan, akhir Maret ini, dakwaan sudah rampung, sehingga bisa langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Jadinya, April sudah bisa menjadi disidangkan. "Sekarang tim JPU masih menyusun dakwan, tak lama lagi dilimpahkan ke

Pengadilan. Bisa saja Maret (sudah dilimpahkan)," terang Suhadi, yang juga salah satu JPU.

Suhadi juga memastikan, setelah Tim Sembilan dilimpahkan ke Pengadilan, penyidik di Kejari Klungkung, bisa lebih fokus merampungkan tersangka lainnya, yang saat ini belum ditahan. Diakuinya, masih ada enam tersangka terkait pengadaan lahan dermaga, belum ditahan. Lima orang makelar dan seorang tersangka penjual tanah negara. "Kalau yang ini (Tim Sembilan) sudah di pengadilan, kami fokus tersangka lainnya," pungkas Suhadi. (wan/rid)

Edisi : Minggu, 22 Maret 2015

Hal : 21